



PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022



LURAH ARGOREJO
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN ARGOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar pengelolaan keuangan Kalurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
21. Peraturan Kalurahan Argorejo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Argorejo, (Lembaran Kalurahan Argorejo Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Argorejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, (Lembaran Kalurahan Argorejo Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Kalurahan Argorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Argorejo Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN ARGOREJO

Dengan
LURAH ARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN ARGOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	207.754.000,00
- Hasil Aset Kalurahan	Rp	207.754.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	4.123.889.366,00
- Dana Desa	Rp	1.491.661.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah	Rp.	504.258.166,00
- Alokasi Dana Desa	Rp.	1.307.970.200,00
- PPBMP	Rp.	650.000.000,00
- Bantuan Keuangan Khusus	Rp.	150.000.000,00
- P2MK	Rp	20.000.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	10.000.000,00
- Jasa/Bunga Bank	RP.	10.000.000,00
Jumlah Pendapatan		4.341.643.366,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	2.362.212.581,00
b. Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.710.719.500,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	226.456.250,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	363.449.750,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	160.200.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp.	4.823.038.081,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(481.394.715,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	486.394.715,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	481.394.715,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan berupa Struktur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah Argorejo menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pada jenis belanja tak terduga;
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah Argorejo dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Argorejo.

Ditetapkan di : Argorejo
pada tanggal : 30 Desember 2022

LURAH ARGOREJO,



NOADIMIN


Diundangkan di : Argorejo
pada tanggal : 30 Desember 2022

CARIK,



ANDRY YUNIANITA

LEMBARAN KALURAHAN ARGOREJO TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN ARGOREJO KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL : (90/Argorejo/2022)



LAMPIRAN - LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ARGOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.754.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.123.889.366,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.341.643.366,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.362.212.581,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.685.430.131,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.196.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.196.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	660.174.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	660.174.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.361.948,00	PAD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.361.948,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	270.161.743,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.861.743,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	116.040.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	116.040.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.540.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamukskal	19.340.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	19.340.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamukskal	75.747.500,00	ADD, PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	75.747.500,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamukskal	68.959.500,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.33	5.1.	Belanja Pegawai	68.959.500,00	
1.1.36		Tunjangan Masa Kerja	59.520.000,00	ADD, PBH
1.1.36	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
1.1.37		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	220.189.200,00	ADD
1.1.37	5.1.	Belanja Pegawai	220.189.200,00	
1.1.38		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorier	22.200.000,00	ADD
1.1.38	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	315.314.950,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	307.314.950,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	307.314.950,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	68.483.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	29.240.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.240.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.251.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	33.652.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.652.500,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1.340.000,00	ADD, DDS
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	252.378.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.270.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.270.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	47.650.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.795.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.795.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.080.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.256.000,00	DLL, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.256.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.240.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.580.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	80.200.000,00	ADD, DLL, SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	66.207.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.207.000,00	
1.4.95		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	6.100.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	40.606.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.606.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.606.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	15.000.000,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.710.719.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	77.995.293,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.070.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	67.234.793,00	DDS, PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.234.793,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.190.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
2.1.91		Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI)	3.500.000,00	DDS
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	764.003.336,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	131.597.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.597.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	497.927.836,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.927.836,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	7.787.500,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.787.500,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	21.090.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.090.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, Dll)	33.525.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.525.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.476.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.476.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	550.559.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	364.965.500,00	DDS, PBK, SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	314.965.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	185.593.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	185.593.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.434.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.93		Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	53.434.500,00	DDS
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	53.434.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	96.372.371,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	96.372.371,00	DDS, PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.372.371,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	120.000.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	120.000.000,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	18.355.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	18.355.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.355.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>226.456.250,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	76.225.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	30.175.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.575.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	22.550.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	23.500.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.621.250,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	8.650.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	9.946.250,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.946.250,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	5.025.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	42.670.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	9.750.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	22.170.000,00	ADD, DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.570.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.750.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	83.940.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	29.560.000,00	PAD, PBH, SDD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.560.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	33.790.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.790.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.455.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.455.000,00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	11.135.000,00	DDS, SDD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.135.000,00	
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	363.449.750,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	19.985.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	19.985.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.985.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	286.036.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	33.480.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.480.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	233.471.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	233.471.500,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	19.085.000,00	DDS, SDD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.085.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.940.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.800.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.540.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
4.3.93		Peningkatan Kapasitas Pengembangan Desa Wisata	28.600.000,00	ADD, PBH, PBK
4.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.795.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.385.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.385.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.410.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.693.250,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.693.250,00	DDS, PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.693.250,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	160.200.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.000.000,00	PBK
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	151.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.823.038.081,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(481.394.715,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	486.394.715,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	481.394.715,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

ARGOREJO, 30 December 2022

LURAH
LURAH
ARGOREJO

NGADIMIN, S.H

